KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	95%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	79
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	73
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp320.425.833.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2023
Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA
MENKO POLHUKAM

Sasaran Strategis	Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Definisi Sasaran Strategis	Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik sebagai tujuan akhir
Indikator Kinerja	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan nasional yang akan dikoordinasikan, disinkronisasikan, serta dilakukan pengendalian adalah: 1. Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) digunakan untuk menilai kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Unit analisis IDI adalah provinsi. Capaian IDI nasional merupakan agregasi dari capaian provinsi. Selain capaian nasional, IDI menghasilkan nilai indeks untuk setiap provinsi, setiap aspek, setiap variabel, dan setiap indikator. Secara keseluruhan hasil IDI merupakan suatu sketsa tentang kondisi

	demokrasi di Indonesia yang cukup komprehensif. Aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0-100. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik. Target IDI 2022 yang diukur pada TA 2023 adalah sebesar 78,37. 2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Citra Indonesia di mata dunia internasional adalah persepsi yang dipercayai/diyakini *stakeholder* eksternal terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan Internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan *power* yang dimiliki baik yang bersifat *hard* maupun *soft*. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif dan negatif. Target Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional tahun 2023 adalah sebesar 3,95. 3. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui survei perilaku anti korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Target Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2023 adalah sebesar 4,09. 4. Terpenuhinya Kekuatan Pokok *Minimum Essential Force* (MEF) Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta

	mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. Target Nasional MEF tahun 2023 adalah sebesar 93%. 5. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas (*crime rate*) merupakan indikator yang merepresentasikan tingkat keamanan di Indonesia yang diukur melalui kuantitas kelompok atau komunitas yang melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana sehingga memengaruhi keseimbangan masyarakat. Target tingkat kriminalitas (*crime rate*) per 100.000 penduduk tahun 2023 adalah sebanyak 111 orang per 100.000 penduduk. 6. Skor *Global Cybersecurity Index* *Global Cybersecurity Index* (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota *International Telecommunication Union* (ITU) terhadap peningkatan kesadaran *cybersecurity*. GCI membahas seputar *Global Cybersecurity Agenda* dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: a. *Legal* (hukum) b. *Technical* (teknis) c. *Organizational* (organisasi) d. *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) e. *Cooperation* (kerja sama) Target skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) tahun 2023 adalah sebesar 88,54. 7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur.

	Target Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik ke Atas tahun 2023 antara lain: 1) Kementerian/Lembaga : 85% 2) Provinsi : 80% 3) Kab/Kota : 55%
Sumber Data	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Kementerian Luar Negeri 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 4. Kementerian Pertahanan 5. Polri 6. *International Telecommunication Union* (ITU) 7. Kementerian PAN RB
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Jumlah capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik}}{\text{Target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$
Sasaran Strategis	Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik
Indikator Kinerja 1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
Definisi	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kinerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	KemenPAN RB
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai KemenPAN RB
Indikator Kinerja 2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam (SAKIP)
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematik dari

	berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen dalam penilaian evaluasi SAKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	KemenPAN RB
Cara Menghitung	Penilaian berasal dari Tim Penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KemenPAN RB dengan kategori penilaian sebagai berikut: 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Definisi	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Empat opini BPK, yaitu: WTP, WDP, *adverse*, dan *disclaimer*.
Sumber Data	Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	Penilaian yang berasal dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

MENKO POLHUKAM

MOH. MAHFUD MD